

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Surat kabar merupakan salah satu media massa cetak hasil revolusi di bidang komunikasi selain media massa elektronik yaitu televisi dan radio. Surat kabar merupakan jendela dunia dimana berita sebagai isi utamanya menyajikan berbagai macam informasi dari segala aspek bidang kehidupan. Kebutuhan masyarakat akan informasi secara aktual menjadikan surat kabar menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Berita-berita yang dimuat dalam sebuah surat kabar adalah uraian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan layak untuk disebarakan kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan membaca surat kabar, masyarakat dapat mengetahui dan membuka informasi terhadap segala fenomena ataupun isu-isu yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Salah satunya adalah isu tentang partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan beragam etnis. Keberagaman etnis tersebutlah yang terkadang menjadi isu dan membuahkan konflik. Salah satu etnis yang banyak terdapat di Indonesia adalah etnis Tionghoa yaitu sekitar 3% dari penduduk Indonesia (Suryadinata, 2002:11).

Adalah suatu fakta sejarah yang tak terbantah, bahwa warga etnis Tionghoa adalah pendatang (terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad

lampau, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru). Etnis Tionghoa atau bisa juga di sebut etnis Cina di Indonesia ini berasal dari Cina Daratan. Leluhur orang Tionghoa-Indonesia bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk berdagang atau bertukar barang dengan wiraniaga lokal. Di pelabuhan tertentu, sembari menunggu datangnya angin menuju kampung halaman, mereka mendirikan gudang, kadang juga tempat ibadah. Lama-kelamaan menjadi betah dan mencari rejeki di Indonesia (Wibisono,2006:45).

Menurut Alo Liliweri dalam *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya* (2001:335) etnis sendiri berarti himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.

Etnis ini pun terus berkembang di Indonesia dan turun-temurun hidup di Indonesia, tetapi keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia masih dibedakan dengan etnis lain yang ada di Indonesia. Perbedaan terhadap etnis Tionghoa tersebut dimulai pada zaman penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, dimana Belanda pada saat itu membagi penduduk Indonesia menjadi 4 (empat) golongan ras/etnis ataupun agama sebagaimana tertuang dalam *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu : Eropa (*Staatsblad* (S). 1849), Tionghoa (S.1917), Indonesia asli Kristen (S.1933) dan Indonesia asli non-Kristen (S.1920) yang masing-masing dibedakan perlakuan status perdatanya. (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=10607&cl=Kolom>, diunduh tanggal 11 Mei 2010)

Kebijakan model kolonial tersebut pun diwariskan dan masih dipergunakan pemerintah Indonesia hingga masa setelah kemerdekaan sampai pada zaman Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pun memunculkan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia dan membedakan etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia.

Hingga kemudian setelah reformasi pada tahun 1998, disahkan peraturan perundang-undangan yang menganggap orang Tionghoa berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. ([http://www.embassyofindonesia.org/consular/pdf/UU\\_no\\_12\\_th\\_2006.pdf](http://www.embassyofindonesia.org/consular/pdf/UU_no_12_th_2006.pdf), diunduh tanggal 12 November 2008).

Seperti yang dikemukakan Leo Suryadinata dalam *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* (2002:100): Pada zaman orde baru pemerintah Indonesia menggunakan istilah Cina untuk menyebut orang Tionghoa yang ada di Indonesia. tetapi istilah Cina sendiri sebenarnya mengandung arti yang merendahkan dan oleh orang-orang yang bersangkutan dianggap sebagai sebutan yang menghina dan meremehkan. Penggunaan istilah Cina tersebut bermakna seperti penggunaan kata “*nigger*” untuk menyebut orang kulit hitam di Amerika Serikat. Sehingga orang keturunan Cina di Indonesia lebih memilih disebut dengan istilah Tionghoa dibandingkan dengan istilah *Cina*.

Sejarah etnis Tionghoa di Indonesia cukup kelam. Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825-1830. Kemudian pada masa Orde Lama dan Orde Baru sejarah politik diskriminatif terhadap etnis Tionghoa terus berlangsung kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta dan kerusuhan dan penjarahan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Solo. (Setiono, 2008:6)

Etnis Tionghoa dianggap selalu menimbulkan masalah bagi Indonesia. Mula-mula mereka dianggap pro Belanda dan antinasionalisme Indonesia. Kemudian mereka dianggap eksklusif dan kerjanya hanya mencari keuntungan di kalangan pribumi yang menderita. Kemudian mereka juga dianggap komunis atau simpatistan komunis. Akhir-akhir ini mereka dianggap sebagai kaum kapitalis dan konglomerat yang terus mengeruk harta negara. Berbagai persepsi negatif tersebut membuat etnis Tionghoa mengalami berbagai macam diskriminasi. (Suryadinata, 2002:18)

Diskriminasi menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.([www.bappenas.go.id/get-file-sever/node/6126/](http://www.bappenas.go.id/get-file-sever/node/6126/), diunduh tanggal 12 Mei 2010)

Pada masa Orde Baru diskriminasi yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru begitu kental. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya larangan yang ditetapkan pemerintah Orde Baru. Seperti larangan penggunaan nama Cina, sekolah-sekolah Cina, pemakaian huruf Cina dalam buku dan publikasi dan merayakan perayaan Tionghoa ( Tahun baru Cina) serta larangan terhadap agama yang dianut orang Tionghoa dan segala macam budaya yang berbau Cina seperti yang tertulis dalam Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan agama, kepercayaan dan adat istiadat dan Cina. Selain itu etnis Tionghoa secara tidak langsung dilarang terjun dalam dunia politik dan pemerintahan. Selama Orde Baru juga terdapat penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya mempertanyakan status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu dalam membuat SKBRI, warga Tionghoa juga sering kali dipersulit, sedangkan tanpa

SKBRI, warga Tionghoa tidak dapat membuat kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia.(Wibowo, 2008:23)

Politik pengawasan juga dilakukan pemerintah Orde baru dengan cara menandai KTP warga Tionghoa dengan cara pemberian spasi di depan nomor registrasi kartu.( Nadapdap,2003:9)

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa mungkin terjadi karena adanya pandangan bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia cenderung membela negara asalnya yaitu Republik Rakyat Cina yang dianggap berbahaya karena merupakan negara yang menganut paham komunis. Hal tersebut tertuang dalam berita di harian *Kompas* edisi 5 Januari 2004.

Kebijakan asimilasi rezim Orde Baru yang telah menekan warga Tionghoa berangkat dari persepsi akan kuatnya kaitan warga Tionghoa dengan RRC. Di mata pemimpin Indonesia kesetiaan warga Tionghoa lebih tertuju kepada RRC daripada ke Indonesia. Di samping itu di benak pemimpin Indonesia kala itu, RRC sebagai negara yang berbahaya karena dianggap berada di balik peristiwa G30S PKI. Kemudian Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan beberapa kebijakan seperti mengubah nama (1961), proses naturalisasi (1969), dan di tutupnya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina (1966). ( *Kompas*, 5 Januari 2004).

Karena trauma pada masa lalu yaitu dianggap sebagai komunis dan mendukung RRC membuat etnis Tionghoa menjauhi dunia politik di Indonesia. Selain itu dunia politik pada zaman Orde Baru memang “ditutup” bagi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dilarang untuk berpartisipasi dalam dunia politik di

Indonesia ([www.suarapembaruan.com/News/2009/02/12/Editor/edit02.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2009/02/12/Editor/edit02.htm), diunduh tanggal 6 Maret 2009)

Partisipasi politik sendiri menurut Miriam Budiarmo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1999:161) merupakan semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan partisipasi politik ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.

Sikap Orde Baru yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dalam dunia politik membuat partisipasi politik etnis Tionghoa pada masa Orde Baru boleh dibilang “mati”. Lapangan kerja bagi etnis Tionghoa terbatas, kemudian sebagian besar dari etnis Tionghoa ini memilih mencari nafkah dengan berdagang atau berbisnis. Hal ini kemudian membuat stereotipe bagi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dianggap hanya peduli dengan uang, dekat dengan penguasa, binatang ekonomi, apolitis, tidak nasionalis, tidak memiliki integritas kebangsaan, eksklusif, dan hedonis. ([www.suarapembaruan.com/News/2009/02/12/Editor/edit02.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2009/02/12/Editor/edit02.htm), diunduh tanggal 6 Maret 2009)

Tetapi kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid larangan terhadap segala macam yang berbau Cina pun dicabut dengan keluarnya Keppres No 6 Tahun

2000. Sehingga etnis Tionghoa kemudian dapat merayakan Hari Raya Imlek secara bebas. (*Kompas*, 5 Januari 2004)

Hingga pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau mengeluarkan Keppres No 19/2002 yang menetapkan tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional (libur). Namun di masa pemerintahan kedua presiden tersebut lebih dari 60 buah peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa masih belum juga dihapuskan, terutama masalah SBKRI. (*Suara Pembaruan*, 21 Februari 2004)

Trauma masa lalu karena sejak zaman Orde Lama hingga Orde baru etnis Tionghoa ini mengalami berbagai macam diskriminasi termasuk dalam dunia politik pun membuat mereka pun menjadi skeptis dan juga apatis. Hal tersebut juga masih terlihat dalam Pemilu 2004.

Ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa (INTI) Benny G. Setiono mengatakan masyarakat Tionghoa skeptis terhadap pemilu 2004. Menurutnya sikap skeptis ini muncul karena banyaknya partai politik peserta pemilu, sehingga mereka kebingungan dan cenderung bersikap skeptis. (*Sunariah*, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), download 28 Oktober 2008).

Selain itu diskriminasi terhadap warga Tionghoa terbukti belum juga hilang walaupun semua pejabat sudah gambar-gembor masalah persamaan hak dan anti rasisme.

Warga keturunan Tionghoa malah kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004 karena mereka belum tercatat sebagai calon pemilih. Alasannya, banyak yang tidak memiliki Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) sehingga mereka sulit mendapat surat lain, termasuk KTP yang menjadi syarat pencatatan pemilih. (*Kompas*, 12 November 2003).



Diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia di masa lalu bahkan hingga sekarang ini membuat partisipasi politik etnis Tionghoa tidak begitu terlihat. Masih sangat sedikit etnis Tionghoa yang mau terjun dalam dunia politik. Termasuk juga dalam Pemilu 2004, dimana pada Pemilu ini terdapat 24 partai peserta Pemilu dan tidak ada satu pun partai berbasis Tionghoa yang lolos dalam verifikasi partai peserta Pemilu. (<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/21/Editor/edi2.htm>, diunduh tanggal 30 Oktober 2008)

Selain itu pada Pemilu 2004 ini untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR/DPRD dan juga DPD. Pada Pemilu 2004 masyarakat Indonesia juga bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia pada periode 2004-2009. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan Umum ini adalah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan Umum ini diselenggarakan selama 2 putaran. Pada Pemilu putaran pertama yang dilaksanakan 5 juli 2004 terpilihlah dua pasangan yang akan melaju pada Pemilu putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 september 2004. Pasangan tersebut adalah Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi dengan jumlah suara 44.990.704 dengan presentase 39,38% dan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dengan jumlah

suara 69.266.350 dengan presentase 60,62%. Kedua pasangan ini melaju pada Pemilu Presiden putaran kedua yang kemudian di menangkan oleh H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dengan jumlah suara 69.266.350 dengan presentase 60,62%. (www.partai.info, diunduh 30 Oktober 2008).

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian dalam Pemilu 2009 terdapat 34 partai politik yang lolos verifikasi. Pada Pemilu 2009, Pemilu untuk memilih caleg-caleg untuk DPR/DPRD dan DPD dilaksanakan tanggal 5 April 2009 sedangkan untuk Pemilu presiden diselenggarakan pada 8 Juli 2009 di mana terpilih tiga pasangan yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo kemudian Jusuf Kalla dan Wiranto. Pemilu 2009 ini kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014.

Media massa ikut mengambil bagian dalam memberitakan tentang etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Salah satu fungsi media masa adalah menginformasikan sebuah peristiwa kepada pembaca. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 merupakan berita yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat karena etnis Tionghoa juga merupakan bagian Indonesia dan warga negara Indonesia yang selama ini selalu terdiskriminasi, tetapi

dalam Pemilu mereka tidak lagi menjadi etnis yang terdiskriminasi karena suara dari mereka pun diperlukan dalam Pemilu.

Menurut Ashadi Siregar ( 1998:19), media massa dalam memuat berita memiliki dua pilihan maksud yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian atau memenuhi kebutuhan khalayak. Media yang mementingkan tercapainya tujuan ekonomis akan memilih berita yang bernilai jual tinggi. Sedangkan media yang ingin agar tujuan ideologinya tercapai yakni informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca akan memuat berita-berita yang berguna bagi khalayak. Beberapa media menganggap informasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis, maka media tersebut menyampaikan informasi untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan tujuan ideologis yang hendak dicapai oleh media tersebut.

Tiap media mempunyai *frame* yang berbeda terhadap suatu peristiwa sehingga berita yang dihasilkan media yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Demikian juga dengan *Kompas* mempunyai *frame* yang berbeda dalam mengangkat berita tentang Partisipasi Politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan pemilu 2009. Sebenarnya sudah ada beberapa riset mengenai etnis Tionghoa misalnya riset mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 yang dilakukan Christine Susanna Thjin, peneliti dari CSIS. Berdasarkan riset tersebut ditemukan bahwa di Pemilu 2004, dinamika etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, walaupun sebagian masyarakat terutama elit

politik tampak masih nyaman dengan stigma 2% dari jumlah etnis Tionghoa 70%. Akibatnya dalam pemilu 2004 partisipasi politik komunitas Tionghoa masih dianggap sebatas 'partisipasi celengan'. (*Kompas*, 20 September 2004)

Tetapi pada penelitian ini secara khusus lebih ingin melihat institusi media massa dalam membingkai berita tentang partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Institusi media yang diteliti adalah *Kompas*. Alasan peneliti mengambil Harian Umum *Kompas* dalam penelitian mengenai Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dikarenakan *Kompas* merupakan surat kabar yang mempunyai latar belakang pendirinya salah satunya adalah seorang Tionghoa yang bernama Peng Koen Auw Jong atau Petrus Kanisius Ojong yang kemudian populer dengan nama PK Ojong. PK Ojong adalah seorang Tionghoa yang mendukung asimilasi dan menentang diskriminasi, prinsip tersebut juga ia terapkan dalam mengelola media beberapa perusahaan media massa.

“.....Ojong yang meninggal pada 31 Mei 1980 merupakan salah satu tokoh Tionghoa yang tidak hanya menyebarkan gagasan tentang asimilasi, tetapi sekaligus langsung mempraktikkan gagasan tersebut tatkala mengelola beberapa perusahaan media massa. (*Kompas*, Senin 3 Maret 2008)

Selain itu terdapat berita dari *Kompas*, yang penulis asumsikan mendukung Tionghoa dan menyerukan anti diskriminasi bagi etnis Tionghoa.

“Politik diskriminasi masih terus berlangsung, bahkan kian lama kian memburuk. Demikian juga dengan kerusuhan rasial anti-Cina yang menimbulkan nestapa yang tak terperikan.

Pendek kata, etnis Tionghoa tetap hidup dalam ketertindasan politik dan kultural, kecuali segelintir cukong kaya yang menjadi partner setia para pemegang kekuasaan”.(*Kompas*, Jumat 1 Juni 2001)

Dukungan harian *Kompas* terhadap etnis Tionghoa juga dikemukakan oleh Leo Suryadinata dalam *Negara dan etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* (2002:109) hal tersebut terjadi pada tahun 1967, ketika itu hubungan Indonesia dan RRC dalam keadaan kritis. Terjadi demonstrasi besar-besaran di mana 30.000 orang Tionghoa ikut mengantar jenazah Ling Siang Yu, seorang warga RRC yang dituduh sebagai mata-mata oleh Indonesia dan kemudian meninggal dalam penjara Indonesia. Kedutaan RRC dan etnis Tionghoa di Indonesia menganggap Ling telah disiksa sampai mati, tetapi pemerintah Indonesia menyangkalnya. Demonstrasi tersebut berubah menjadi bentrokan antara warga pribumi dan etnis Tionghoa. Dalam keadaan yang cukup tegang ini surat kabar harian *Kompas* memuat sebuah karangan berupa opini yang simpatik dan peka terhadap orang Tionghoa. Tulisan yang berjudul “*Surat dari Bangkok*” tersebut ditulis oleh Muchtar Lubis dan diterbitkan *Kompas* pada tanggal 29 April 1967, yang menyuarakan kekhawatirannya mengenai perkembangan perasaan rasialisme di Indonesia yang menjatuhkan nama Indonesia di luar negeri. Selain itu Muchtar Lubis juga menuliskan karena etnis Tionghoa selalu di diskriminasi hal tersebut akan mengganggu kesetiaan orang Tionghoa di Indonesia. Lubis juga menulis:

“pemakaian istilah “Tjina” mungkin sesuai untuk menunjukkan kemarahan kita terhadap Peking, tetapi istilah itu digunakan karena itu dirasakan mengandung penghinaan terhadap golongan Tionghoa. Dan pemakaian istilah “Tionghoa” tidak bisa dibatasi pada warga negara RRT, tetapi paling sedikit ini akan melukai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa”.(Suyadinata, 2002:109)

Alasan lainnya yaitu karena *Kompas* merupakan sebuah surat kabar yang mendukung dan memberikan fasilitas terhadap terjadinya pluralisme. Hal tersebut dapat dilakukan *Kompas* dengan membentuk perkumpulan yang mewadahi para penulis dan pemikir muda Indonesia yaitu Lingkar Palmerah pada 19 Agustus 2005 yang kemudian berganti nama menjadi Lingkar Muda Indonesia(LMI). Lingkar Muda, dibentuk *Kompas* sebagai upaya menghimpun kreatifitas penulis dan para pemikir muda bangsa ini. ( Sularto, 2007:170)

Lingkar Muda Indonesia ini sering menggelar diskusi yang membicarakan tentang keadaan Indonesia. Salah satu tema dari seri diskusi yang diadakan oleh LMI adalah “*Dekonstruksi dan Revitalisasi Keindonesiaan*” Melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Lingkar Muda Indonesia ini dan diberitakan oleh *Kompas*, *Kompas* turut serta mendukung pluralisme agar tidak memandang etnis dan agama dan tidak ada diskriminasi terhadap etnis apa pun dan Indonesia dengan segala keberagaman yang ada baik budaya, bahasa, agama dan etnis tersebut sebaiknya saling bahu-membahu untuk kembali membangun Indonesia dari keterpurukan yang disebabkan oleh bencana alam, korupsi, kemiskinan, utang negara, pertikaian agama

dan etnis dan berbagai masalah lain yang terjadi di Indonesia. Lingkar Muda Indonesia ini terdiri dari empat komponen yaitu kaum muda Nahdlatul Ulama(NU), kaum muda Muhammadiyah, kaum muda masyarakat Sipil atau LSM dan kaum muda akademisi. (“*Diskusi Lingkar Muda Indonesia : Indonesia dan Fundamentalisme Ganda*”, *Kompas*, 22 Mei 2006)

Surat kabar yang pertama kali terbit pada tanggal 28 juni 1965 ini juga merupakan salah satu surat kabar nasional di Indonesia yang mempunyai oplah terbesar yaitu berkisar 500.000 dan pada hari Sabtu-Minggu 600.000.(Sularto, 2007: 74).

Hal lain yang menjadi pertimbangan penulis adalah *Kompas* memiliki kredibilitas tinggi bagi *stakeholders*-nya, bahkan menjadi “barometer” industri media yang berhasil menyatukan langkah bisnis dan idealisme.(Sularto,2007:45).

Peneliti mengambil tema pemberitaan tentang partisipasi politik etnis Tionghoa karena penulis ingin melihat bagaimana media khususnya *Kompas* memberitakan tentang etnis Tionghoa. Penelitian ini penulis harapkan menjadi menarik karena mengangkat tentang etnis Tionghoa dalam partisipasi politiknya. Dimana etnis ini berdasarkan sejarahnya mengalami berbagai macam tekanan, pembedaan dan diskriminasi terutama di dalam haknya untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Penulis ingin melihat apakah *Kompas* ikut mendiskriminasi dan terpengaruh stereotipe yang selama ini melekat pada etnis Tionghoa dengan menonjolkan isu-isu yang negatif tentang etnis Tionghoa atau *Kompas* bersikap

positif ataupun netral dalam pemberitaan tentang partisipasi politik yang dilakukan oleh etnis Tionghoa.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimanakah *Kompas* mbingkai pemberitaan tentang partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 edisi Oktober 2003-September 2004 dan Oktober 2008-September 2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana *Kompas* mbingkai pemberitaan partisipasi politik tentang etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 Oktober 2003-September 2004 dan Oktober 2008-September 2009.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **D.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi penelitian yang menggunakan metode analisis *framing* pada Program Studi Ilmu Komunikasi

### **D.2 Manfaat Praktis**

a. Mengetahui *frame* berita pada media massa, khususnya Kompas tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan menggunakan analisis *framing*.



b. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan analisis *framing*.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini difungsikan sebagai perangkat dalam menganalisis hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dipahami maka penulis membaginya ke dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

### **E.1. Berita sebagai Produk Jurnalistik**

Berita berasal dari sebuah peristiwa yang juga adalah realitas, dan pada dasarnya setiap hari manusia pasti mengalami berbagai macam peristiwa dan realitas sosial. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua peristiwa dan realitas sosial dapat dijadikan atau digolongkan sebagai berita.

Secara teoritis ada banyak definisi mengenai berita, misalnya saja definisi yang dikemukakan oleh Y.B Margantoro dalam *Biar Berita Bicara* (2001:30): berita adalah segala sesuatu yang hangat, menarik perhatian sejumlah pembaca, dan berita yang terbaik adalah yang paling menarik bagi pembaca terbesar.

Suatu peristiwa yang dijadikan berita, paling tidak memiliki dua alasan, yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian suatu media massa atau untuk memenuhi kebutuhan pembacanya. Karena itu, dari sisi kepentingan pembaca, pada umumnya setiap orang mengharapkan berita yang dapat memenuhi atau membantu mencapai tujuan hidupnya. Adapun yang diinginkan khalayak antara lain (Siregar, dkk. 1998:20):

1. Berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupannya, bahaya fisik; semacam tindak kekerasan, bahaya alam, penyakit dan sebagainya.
2. Berita yang mengungkapkan ancaman atau tekanan terhadap kebebasan seseorang; semacam penahanan tidak melalui saluran hukum, pengusuran, ketidakadilan ekonomi, dan sebagainya.
3. Berita yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi atau sosial; semacam berita mengenai perkembangan perdagangan, situasi lapangan kerja, petunjuk-petunjuk untuk menambah pendapatan, dan sebagainya.
4. Berita yang mengungkapkan perkembangan atau penghambat dalam peningkatan dalam kehidupan; semacam kemerosotan kehidupan perkotaan (pergelandangan, perumahan sulit), kemajuan dalam bidang kesehatan, dunia hiburan, mode, dan sebagainya.

Dari keinginan pembaca ini, dapat disimpulkan bahwa berita diharapkan bermanfaat bagi kehidupannya. Kemanfaatan itu adalah agar pembaca dapat mengelak atau menghindar dari bahaya yang tidak diinginkannya, atau dapat membantu pembaca mencapai cita-cita atau keinginannya dalam kehidupan sosial. (Siregar, 1998:20)

Setiap peristiwa memiliki nilai berita yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya beberapa jenis/ragam berita. Perbedaan yang berdampak pada format atau jenis berita yang nantinya akan digunakan oleh para

jurnalis, menjadi penting untuk diketahui agar dapat dibedakan sekaligus menjadi ukuran berita mana saja yang dianggap mempunyai nilai berita paling penting dan dituangkan kedalam format/jenis berita langsung dan seterusnya.

Berikut empat jenis atau ragam berita menurut Ashadi Siregar (1998:154-159):

a. Berita langsung (*straight news, spot news, hard news*)

Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian-kejadian penting yang secepatnya perlu diketahui oleh pembaca. Disebut *straight news* karena unsur terpenting dari peristiwa harus langsung (sesegera mungkin) disampaikan kepada pembaca. Disebut *spot news* ketika wartawan berada atau berhadapan langsung dengan peristiwa yang dilaporkan, biasanya peristiwa tersebut sudah terprediksi atau terjadwal. Disebut *hard news* ketika peristiwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang sangat krusial, mengejutkan atau mendadak atau memiliki dampak yang besar.

b. Berita ringan (*soft news*)

Berita ringan tidak mengutamakan unsur penting, namun lebih pada unsur menarik. Berita ini biasa ditemukan sebagai berita tentang kejadian menarik dalam kejadian penting, semata-mata hanya memberi sentuhan emosional bagi pembaca. Misalnya kejadian yang konyol (komedi), dramatis, kontroversial, tragis, unik. Bahan yang ditulis sebagai berita ringan adalah kejadian dengan elemen-elemen di tingkat permukaan saja, tidak terlalu melacak latar belakangnya.

c. Berita kisah (*feature*)

Berita kisah adalah tulisan mengenai kejadian yang dapat menyentuh perasaan, ataupun yang menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan rinci, lengkap, serta mendalam.

d. Laporan mendalam (*in-depth report*)

Laporan mendalam digunakan untuk melaporkan sebuah permasalahan atau kenyataan secara lebih lengkap. Cara peliputan seperti peliputan interpretatif atau peliputan investigatif dilakukan untuk mengumpulkan fakta yang diperlukan dalam menyusun tulisan. Peliputan interpretatif digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa dibutuhkan kemampuan interpretasi dalam melihat kemampuan logis antar sejumlah fakta. Model peliputan investigatif digunakan ketika sejumlah pihak menutupi kejadian sebenarnya atau menyembunyikan sejumlah fakta.

Pengkategorisasian berita tersebut menjadi pedoman bagi wartawan untuk menentukan bagaimana sebuah realitas diklasifikasikan bahkan bagaimana sebuah peristiwa didefinisikan, dipahami, dan direkonstruksi. Melalui kategorisasi berita kita bisa melihat aspek mana yang diperhatikan dan bagian mana dari peristiwa yang akan ditulis.

Berita yang adalah produk dari jurnalisme ini pada dasarnya merupakan laporan tentang suatu peristiwa. Sehingga proses jurnalisme yang terjadi yaitu upaya menceritakan kembali suasana, keadaan, orang, benda, bahkan pendapat yang ada dalam suatu peristiwa, sebenarnya merupakan upaya untuk merekonstruksi realitas.

Realitas yang dikonstruksi oleh jurnalis maupun oleh institusi media inilah yang menjadi hal yang menarik dan ingin penulis teliti dalam obyek penelitian ini.

Oleh karena itu perlu dicermati apakah sebuah realitas yang dijadikan berita itu sesuai dengan faktanya atau merupakan hasil rekonstruksi dari sebuah institusi media.

## **E.2. Konstruksi Realitas Sosial**

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman seperti yang dikutip Eriyanto dalam *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi dan Politik Media* (2002:15). Realitas menurut Berger tidak datang begitu saja tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini realitas berwujud ganda/prural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing individu.

Lebih lanjut gagasan Berger mengenai konteks berita harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dalam pemberitaannya.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil. Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta. Realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya proses internalisasi dimana wartawan dilanda oleh realitas yang ia amati dan diserap dalam kesadarannya.

Kemudian proses selanjutnya adalah eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika ini. (Eriyanto, 2002:17)

Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan memandang realitas tapi kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu mempengaruhi cara media massa tersebut mengonstruksi realitas. (Hamad, 1999:55)

Menurut Hamad, karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidak berlebihan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. (Sobur, 2001:98)

Menurut Eriyanto, terdapat dua penekanan karakteristik penting pada pembuatan konstruksi realitas. *Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan bagaimana politik pemaknaan dan bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan konstruksi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis. Kedua karakteristik ini menekankan bagaimana politik pemaknaan dan bagaimana cara makna tersebut ditampilkan, sebab dalam penekanan tersebut produksi pesan tidak dipandang sebagai “*mirror reality*” yang hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya (Eriyanto, 2002:40)

Dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita ataupun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa. (Hamad,dkk,2001:69)

Menurut De Fleur dan Ball-Rokeach, ada berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna, antara lain: mengembangkan kata-kata baku beserta makna asosiasinya; memperluas makna dan istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama serta istilah dengan makna baru; serta memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa.(Hamad, dkk,2001:70)

Media menggunakan bahasa yang berbeda-beda dalam membangun konstruksi realitas. Walaupun realitas tersebut mempunyai fakta yang sama. Hal mengonstruksikan realitas fakta ini tergantung pada kebijakan redaksional yang dilandasi pada politik media itu. Salah satu cara yang bisa dipahami atau digunakan untuk menangkap cara masing-masing media membangun sebuah realitas berita adalah dengan *framing*.(Nugroho, dkk,1999 :1)

### **E.3. Framing**

Menurut Eriyanto dalam *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi dan Politik Media* (2002:99), *framing* bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), tetapi juga berhubungan dengan proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas

dari organisasi media. Seorang wartawan hidup dalam suatu institusi media dengan peraturan-peraturan dan pola kerja yang ditetapkan media tersebut sehingga bukan tidak mungkin media mengontrol wartawan dalam melihat suatu realitas dan mengharuskan wartawan mengemas berita sesuai dengan pandangan media tersebut, atau bisa juga terjadi wartawan merupakan bagian dari suatu komunitas dan menyerap nilai-nilai dalam komunitas tersebut sehingga dapat mempengaruhi wartawan dalam mengemas berita.

Menurut Eriyanto(2002:68), *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang kemudian bagian mana dari suatu realitas yang akan di ambil,ditonjolkan atau bahkan dibuang.

Pada dasarnya *framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) suatu media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar dari “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Jika pada analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi atau *content*-nya, maka dalam analisis *framing* yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh industri media massa. *Framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari suatu peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002:66-67).



Dengan *frame* inilah wartawan memproses berbagai informasi yang tersedia dan mengemasnya sedemikian rupa dalam kategori kognitif tertentu dan kemudian menyampaikannya kepada khalayak.

Terdapat dua aspek dalam *framing* yang dipakai untuk menemukan ideologi yang digunakan media massa untuk membingkai suatu peristiwa (Eriyanto, 2002:70):

#### 1. Memilih fakta atau realitas

Proses pemilihan fakta ini berdasarkan pada asumsi, seorang jurnalis tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam proses pemilihan fakta ini seorang wartawan menentukan fakta apa yang akan dipilih dan mana yang akan dibuang, bagian mana yang akan ditekankan dan bagian mana yang akan diberitakan atau bagian mana yang tidak akan diberitakan. Seorang wartawan dalam melakukan penekanan terhadap aspek tertentu tersebut dapat dilihat dari bagaimana wartawan tersebut memilih *angel* tertentu, fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek yang lain. Intinya adalah suatu peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Oleh karena itu pemahaman dan kontruksi atas suatu realitas bisa berbeda antara media yang satu dengan media yang lainnya.

#### 2. Menuliskan fakta

Dalam proses ini dilihat bagaimana fakta yang dipilih oleh wartawan disajikan kepada khalayak. Gagasan tersebut tertuang dalam kata, kalimat dan proposisi, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar tertentu. Fakta yang sudah dipilih wartawan tersebut kemudian ditekankan dengan pemakaian perangkat seperti penempatan yang mencolok, misalnya sebagai *headline* atau bagian belakang,

pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata atau gambar yang mencolok dan sebagainya. Dalam penulisan fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Realitas yang disajikan secara menonjol mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk diperhatikan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Selain adanya aspek tersebut diatas, menurut Jisuk Woo seperti yang dikutip oleh Eriyanto (2002: 286), terdapat tiga kategori besar elemen *framing*. *Pertama* adalah level makrostruktural, membahas tentang bagaimana peristiwa dipahami dalam tingkat wacana.

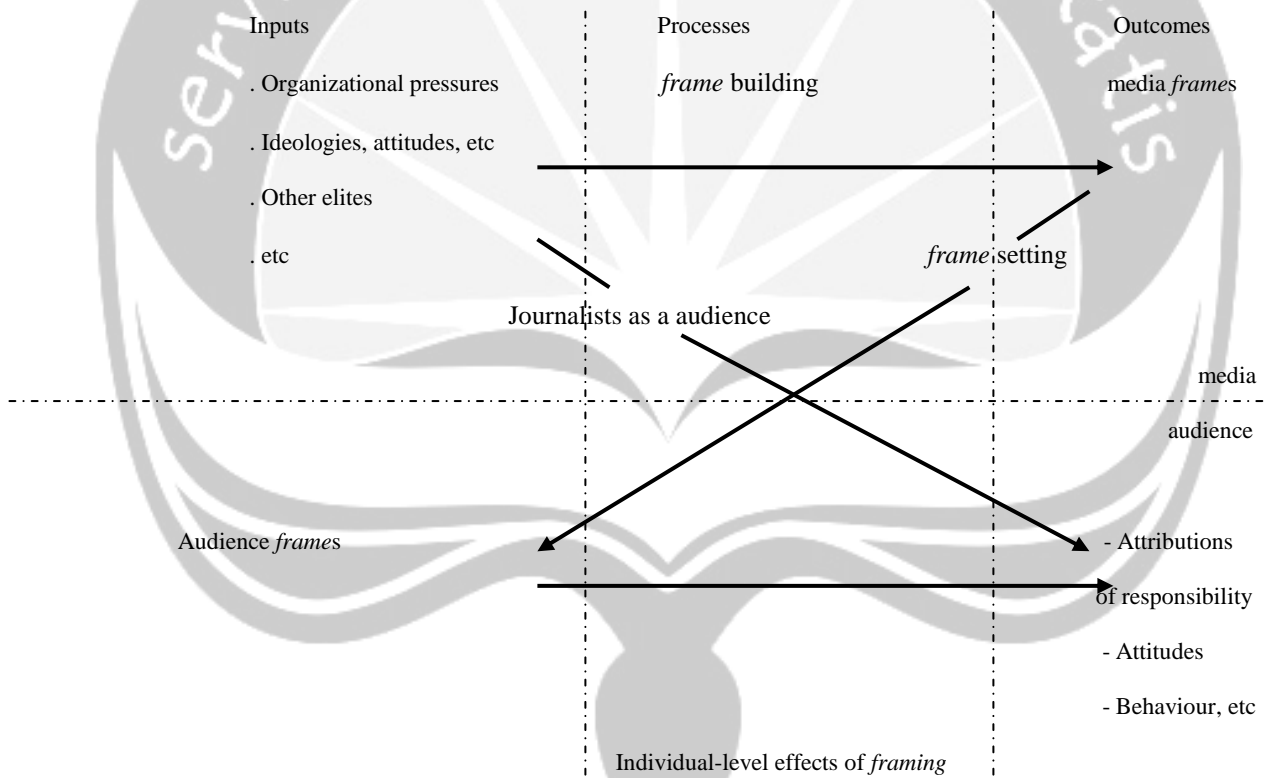
*Kedua*, level mikrostruktural, elemen ini membahas tentang bagaimana suatu peristiwa ditonjolkan dan bagian mana dilupakan. Yang termasuk dalam bagian dari level ini adalah pemilihan fakta, *angle* dan narasumber.

*Ketiga* adalah elemen retorik, elemen ini lebih menyoroti pada bagaimana fakta yang ditekankan. Dimana berita bukan hanya berisi tentang pemilihan fakta tetapi juga penekanan fakta, misalnya dengan pemilihan kata, kalimat, gambar atau retorika tertentu.

Dengan analisis *framing* dipercaya dapat mengungkap strategi apa saja yang digunakan oleh media massa, bagaimana caranya, dan mengapa media massa menggunakan *frame* tertentu untuk sebuah peristiwa. Selain itu, *framing* juga

membantu kita mengetahui bagaimana realitas yang dikemas secara berbeda oleh media menghasilkan berita yang berbeda pula. Itu sebabnya cara untuk mengetahui pembedaan suatu realitas digunakan metode analisis *framing* beserta dengan perangkat analisisnya

**E.4 Proses *Framing***



Bagan 1: Proses Model *Framing*, diambil dari Scheufele(1999:115)

Proses *framing* menurut Scheufele(1999:115) dapat dilihat dari bagan tersebut diatas. Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya pengaruh terhadap isi berita dilandasi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah internal insitusi media,

faktor individu wartawan, ideologi pemerintah hingga pengaruh dari aspek konsumsi *audience*.

Pada bagan tersebut Scheufele (1999-114) membagi *framing* menjadi tiga tahap yaitu *inputs*, *processes* dan *outcomes* lalu kemudian dapat dilihat lagi dari proses *frame building*, *frame setting*, *individual-level effects of framing* dan *journalist as audience*. Pemikiran Scheufele ini muncul karena keprihatiannya terhadap beberapa riset kontruksi berita atau *framing* yang dilakukan beberapa ahli komunikasi sebelumnya masih terpecah-pecah dan belum dapat menjawab pertanyaan bahwa pengaruh referensi yang diperoleh oleh individu sebagai aspek pembentukan *audience frame*. Oleh karena itu maka Scheufele mencoba membuat sebuah alur proses yang lebih lengkap untuk melihat pengaruh *frame* yang dibentuk oleh media dan *frame* yang dibentuk oleh *audience* itu sendiri.

Tahap pertama yaitu *frame building*, dalam tahap ini akan dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerangka berpikir akan sebuah berita. Faktor-faktor tersebut adalah faktor individu wartawan (ideologi, sikap dan norma yang dianut oleh wartawan.), rutinitas media, dan pengaruh eksternal (aktor politik, penguasa, kelompok kepentingan, dan kelompok elit lainnya). Faktor inilah yang dianggap sebagai input oleh wartawan ketika menulis sebuah berita.

Kemudian dalam tahap *frame setting* kita dapat melihat bagaimana wartawan melakukan penekanan terhadap isu, pemilihan fakta, penyembunyian fakta, dan pertimbangan lain yang di analisisnya sehingga memberikan relevansi yang kuat dan

nyata terhadap isu yang diberitakannya. Dalam tahapan ini, Scheufele lebih menekankan terhadap atribut yang membentuk saliansi berita.

*Individual-level effects of framing* adalah bagaimana tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh *audience* yang dapat mempengaruhi pandangan khalayak dalam memahami suatu berita yang disampaikan oleh media. Hal ini kemudian yang akan mempengaruhi tindakan, sikap dan pengaruh kognitif lainnya yang dilakukan oleh khalayak. Perubahan sikap, tindakan hingga level kognitif khalayak dalam memahami isi pesan dari media akan berbeda-beda berdasarkan pengetahuan, pengalaman individu tersebut.

Tahap yang terakhir yaitu *journalist as audience* yang mengandung arti bahwa proses pembentukan berita yang dilakukan oleh wartawan juga dipengaruhi oleh aspek konsumsi yang dilakukan oleh *audience*. Disini wartawan juga berperan sebagai *audience* yang bisa melihat referensi dari media massa lain. Wartawan akan melakukan tugas peliputan dan penulisan berita juga berdasarkan akan peran mereka sebagai konsumen dari media massa sehingga mereka juga dapat membuat berita juga berdasarkan pertimbangan apa yang dimau oleh masyarakat. Dalam hal ini Rhodeback (Scheufele,1999:114) melihat sebagai hubungan timbal balik dari proses *top-down*.

### **E.5 Fungsi Media**

Menurut Pawit M. Yusup dalam modulnya yang berjudul *Komunikasi, Media, Sumber-sumber Informasi, dan Contoh Aplikasi Teori Massa Kontekstual* (2007:3-4), terdapat lima pendekatan fungsional terhadap penggunaan media massa yang

ditunjukkan oleh Harold Lasswell dan Charles Wright masing pada tahun 1948 dan 1960. Para ahli tersebut secara bersama-sama mengemukakan lima unsur yang secara bersama-sama menjelaskan fungsi penggunaan media oleh masyarakat yaitu *surveillance* (pengawasan, pengamatan), *correlation*, transmisi budaya, *entertainment* (hiburan), dan *mobilization* (pengerah kekuatan).

*Surveillance* (pengawasan) berarti media menyediakan dan memberitakan berita kepada masyarakat. *Correlation*, maksudnya adalah media menyediakan informasi dan berita kepada kita setelah mereka mengadakan seleksi, interpretasi, dan evaluasi kritis terhadap semua aspek yang mungkin muncul. Transmisi media berarti bahwa media berfungsi sebagai refleksi dari kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma dari kita dan di tempat lain yang mengusung media. Dengan cara ini mereka bertujuan untuk meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas dasar kemampuan umum mereka. Selain itu media juga berfungsi sebagai sebuah hiburan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, media terutama media massa berfungsi sebagai alat mobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu, terutama pada masa-masa krisis.

Melalui fungsi-fungsi tersebut diatas media berusaha untuk dapat memberitakan suatu peristiwa yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini sebagai teori normatif yang penulis gunakan untuk membantu penulis melihat apakah media sudah benar-benar melaksanakan fungsinya bagi masyarakat

## **F. Metodologi**

### **F.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif. Menurut Rachmat Kriyantono dalam *Teknik Praktis Riset Komunikasi* .( 2007:247) : analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tetapi tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai *guide*, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset. Periset dalam melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis. Pada dasarnya analisis isi kualitatif memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita, iklan, sinetron, lagu, dan simbol-simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Berita, misalnya bukanlah realitas sebenarnya. Berita adalah realitas yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-pertimbangan redaksi, istilahnya disebut “ *second-hand reality* ”. Artinya, ada faktor-faktor subjektivitas awak media dalam proses produksi berita. Karena itu fakta atau peristiwa adalah hasil produksi media.

### **F.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah berita-berita yang ditulis oleh surat kabar harian (SKH) *Kompas* mengenai pemberitaan tentang partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Sumber atau objek berita di ambil dari rubrik Nasional, Politik dan Hukum dan rubrik khusus Pemilu 2004. Dalam rubrik-rubrik tersebut dimuat berita-berita yang diperlukan dalam penelitian ini. Berita-berita tersebut adalah :

No	Judul Artikel	Edisi	Rubrik
1.	Etnis Tionghoa Akan Mendukung Calon Presiden Yang Bisa Hapuskan Diskriminasi	Sabtu, 04 Oktober 2003	Nasional
2.	Perlu, Sosialisasi Politik Bagi Pemuda Tionghoa	Senin, 25 Mei 2004	Politik dan Hukum
3.	Keturunan Tionghoa Belum Tercatat Sebagai Pemilih	Rabu, 12 November 2003	Nasional
4.	TKI dan Warga Tionghoa Terancam Tidak Ikut Pemilu	Senin 02 Februari 2004	Rubrik khusus Pemilihan Umum 2004
5.	Pemilu Pilpres	Sabtu, 16 Mei 2009	Politik dan



	Sofjan Wanandi Kampanyekan JK-WIN		Hukum.
--	-----------------------------------	--	--------

### F.3. Jenis Data Penelitian

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data dari teks asli berita dan hasil wawancara langsung dengan pihak media yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tri Agung Kristanto, Kepala Desk Politik dan Hukum dan Sub Editor Desk Metropolitan Imam Prihadiyoko yang pada saat menulis berita yang penulis teliti beliau masih menjabat sebagai wartawan Desk Politik dan Hukum *Kompas*. Selain itu juga digunakan data sekunder yang berupa buku, jurnal, arsip internet dan skripsi.

### F.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan Kosicki yang dikutip oleh Eriyanto (2002: 252) *framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. *Framing* dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkontruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Berita yang dihasilkan merupakan hasil kontruksi realitas dari wartawan atau media tersebut.

Menurut Eriyanto (2002:254), wartawan bukan sebagai agen tunggal yang menafsirkan peristiwa, sebab paling tidak ada tiga pihak yang saling berhubungan: wartawan, sumber, dan khalayak. Setiap pihak menafsirkan dan mengkontruksi realitas, dengan penafsiran sendiri dan berusaha agar penafsirannya yang paling dominan dan menonjol. Ketika mengkontruksi suatu realitas wartawan tidak hanya menggunakan konsep yang ada dalam pikirannya saja. Tetapi dalam proses kontruksi tersebut wartawan juga melibatkan nilai social yang ada dalam dirinya. Nilai-nilai sosial yang ada dalam diri wartawan ini mempengaruhi bagaimana wartawan tersebut memaknai suatu realitas.

Selain itu ketika menulis berita, wartawan tidak berhadapan dengan publik yang kosong. Khalayak juga menjadi unsur yang penting bagi wartawan dalam menuliskan suatu peristiwa. Hal ini disebabkan karena wartawan bukan menulis untuk dirinya sendiri tetapi untuk dipahami dan dinikmati oleh khalayak. Melalui proses inilah nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat ikut mempengaruhi pemaknaan. Hal lain yang juga mempengaruhi proses kontruksi adalah proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi jurnalistik, dan standar professional dari wartawan.

Dalam pendekatan ini, perangkat *framing* Pan dan Kosicki terdiri dari empat struktur besar (Eriyanto,2002:25766):

- a. Sintaksis

Definisi sintaksis secara umum adalah susunan kata atau frasa dalam suatu kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis mempunyai arti susunan dari bagian-bagian berita *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, penutup. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik yaitu *headline*, *lead*, *episode*, latar informasi, penutup atau *closure*.

#### b. Skrip

Berita sering disusun sebagai suatu cerita karena banyak berita yang menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Menulis berita dalam taraf tertentu dapat disamakan dengan menulis novel atau kisah fiksi, tetapi terdapat perbedaan yaitu terdapat pada fakta yang dihadapi. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5W + 1H (*who*, *what*, *when*, *where*, *why*, dan *how*). Pola ini tidak selalu ada dalam setiap berita, namun wartawan diharapkan memenuhi pola 5W + 1H dalam berita yang ditulisnya. Pola ini menjadi semacam standar kelengkapan berita. Ada tidaknya salah satu unsur dari 5W + 1H dapat menunjukkan *framing* dari wartawan tersebut, demikian juga dengan penjelasan unsur-unsur tersebut yang lebih banyak dari unsur lainnya.

Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita: bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan bagian mana yang didahulukan bagian mana di diletakkan belakangan dengan tujuan untuk menyembunyikan informasi penting yang diletakkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

#### c. Tematik.

Dalam struktur tematik hal yang diamati adalah bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana suatu fakta ditulis. Bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Terdapat beberapa elemen yang dapat diamati dalam struktur tematik ini yaitu koherensi, pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat.

#### d. Retoris

Struktur retorik merupakan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Melalui gaya atau kata yang dipilih, wartawan dapat membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Yang termasuk dalam struktur retorik ini adalah *metaphora*, *exemplars*, *depiction*, *catchphrases* dan *keywords* dan visualisasi gambar. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk memperkuat klaim kebenaran dari suatu berita.

Melalui keempat struktur tersebut dapat terlihat *framing* dari suatu media. Kecenderungan atau ketidaknetralan wartawan dapat dilihat melalui empat struktur tersebut. Melalui keempat struktur tersebut dapat diamati bagaimana wartawan menyajikan suatu peristiwa ke dalam suatu bentuk berita, pemakaian kalimat, pemilihan kata-kata yang digunakan sebagai strategi untuk meyakinkan khalayak bahwa apa yang ditulisnya benar. (Eriyanto, 2002:266)

### **F.5. Teknik Pengumpulan data**

Analisis *framing* adalah penelitian yang dilakukan dalam dua level yaitu level teks dan konteks karena untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian sebuah berita tidak hanya dilihat dari teks berita tetapi dari konteks yang ada ketika berita itu ditulis.

a. Level teks

Data primer didapat dari SKH *Kompas* bulan Oktober 2003-September 2004 dan bulan Oktober 2008-September 2009. Data sekunder dapat dilihat dari buku, makalah, hasil penelitian, skripsi dan sumber arsip internet.

b. Level Konteks

Penulis mewawancarai wartawan *Kompas* yang menulis berita tentang etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan 2009. Pertanyaan yang diajukan seputar proses produksi berita secara khusus penulisan berita, rutinitas media individu wartawan. Penulis bertujuan untuk mencari tahu strategi *framing* yang digunakan dan apa alasannya. Pertanyaan lain yang akan diajukan adalah seputar pendapat pribadi dan pandangan *Kompas* terhadap etnis Tionghoa, serta menanyakan biodata wartawan tersebut.